



Upah Minimum dan Kemiskinan di Pulau Jawa

Sahry Al Nurfatyn^{a,1,*}, Dini Yuniarti^{a, 2,*},

^a Development Economics, Faculty of Economic and Business Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Kapas No. 9, Yogyakarta, 55661, Indonesia
sahrynf@gmail.com¹ dini.yuniarti@ep.uad.ac.id^{*};

* corresponding author

ARTICLE INFO

Received
Revised
Accepted
Published

Keywords

Kemiskinan, Upah Minimum, PDRB,
TPT, RLS, TPAK, BPS

ABSTRAK

Kemiskinan adalah isu kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia dengan menggunakan data dari BPS antara 2013-2022. Variabel yang diteliti mencakup Upah Minimum, PDRB, TPT, RLS, dan TPAK. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin, sedangkan PDRB menunjukkan hubungan positif dengan kemiskinan.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



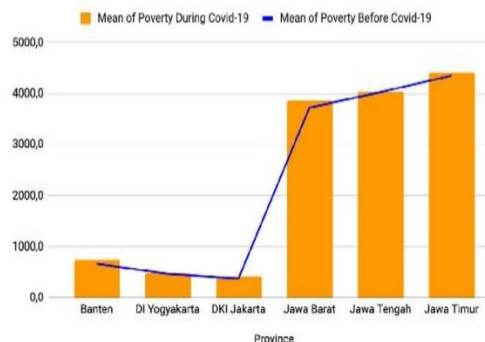
1. Pendahuluan

Masalah kemiskinan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan politik. Kemiskinan muncul karena adanya perbedaan upah minimum (Kuncoro, 2013). Penentuan upah minimum didasarkan pada dua faktor utama yaitu kebutuhan hidup layak dan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya (Abdullah & Hasbiullah, 2023). Pengentasan kemiskinan terkait dengan faktor lain seperti peningkatan integrasi. Di setiap daerah tertentu karena pendapatan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda namun rendahnya tingkat upah minimum tidak selalu mencerminkan kondisi perekonomian di suatu daerah secara keseluruhan, karena akan ada banyak faktor yang berkaitan dengan kemiskinan yang juga perlu diperhatikan. Dalam strategi pembangunan daerah, penanggulangan kemiskinan menjadi target utama yang efektivitasnya menjadi tolak ukur keberhasilan (Sari, 2021). Listri & Khoirudin (2019) menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang karena dalam agenda pembangunan ekonominya bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yaitu pengangguran.

Ulhafiah & Arianti (2023) menjelaskan bahwa upah minimum dengan standar gaji yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja karena besaran upah dapat berdampak pada produktivitas pekerja yang diharapkan turut menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan juga jasa, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Di Pulau Jawa terdapat enam provinsi meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur diikuti Yogyakarta. Masing-masing provinsi memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Meskipun Provinsi Banten dan Jakarta memiliki tingkat upah yang tinggi terdapat faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka (Bank Indonesia, 2021), dikarenakan kurangnya akses terhadap pendidikan disertai program peningkatan keterampilan yang disesuaikan dengan permintaan di dunia kerja yang berkualitas serta faktor lain yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar kota dan desa di Jakarta, yang merupakan kota



padat penduduk dan banyak SDM yang belum banyak mendapatkan pendidikan maupun pelatihan. Kemiskinan terus menjadi isu ekonomi yang kompleks di setiap negara sedang berkembang seperti Indonesia (Prayoga et al., 2022)



Gambar 1. 1 Tingkat Jumlah Penduduk miskin sebelum dan selama Covid-19 pulau jawa 2015-2021

Istanti & Suripto (2009) Kemiskinan merupakan salah satu isu terpenting dalam pembangunan ekonomi yang perlu yang perlu ditangani. Dengan adanya peristiwa Covid-19, perkembangan perekonomian banyak terpengaruhi, salah satunya meliputi perkembangan pengangguran, karena pengangguran memiliki hubungan yang kuat terhadap kemiskinan yang mana jika meningkatnya tingkat pengangguran akan menyebabkan naiknya jumlah kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak dari masalah kesempatan kerja di negara berkembang, apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, maka dampaknya akan mempengaruhi jumlah kemiskinan yang ada.

Di Jawa Barat, meskipun upah minimum tinggi, tantangan seperti biaya hidup yang tinggi dan kurangnya akses pendidikan menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang signifikan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk mengatasi masalah ini melalui pengembangan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan akses pendidikan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci pertumbuhan untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Karena dari mengeksplorasi hubungan antara upah minimum dan kualitas SDM dapat menekankan pentingnya desain kebijakan yang inklusif dan terintegrasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesenjangan upah di Jawa Barat disebabkan adanya perbedaan kekuatan birokrasi pemerintahan dalam menetapkan upah minimum. Perbedaan sumber daya yang dimiliki tiap daerah juga menyebabkan sulitnya pemerintah melakukan pemerataan penetapan nilai UMK (Husada & Yuhan, 2022).

Sugiyanto & Suripto (2020) menyatakan Mengidentifikasi bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) memiliki hubungan yang kuat dengan ketahanan masyarakat miskin untuk mencari nafkah secara permanen. Dalam implementasinya, pengembangan SDM dapat dikembangkan melalui pendidikan formal, sehingga masyarakat miskin dapat memiliki keterampilan dan kepekaan terhadap perubahan eksternal yang dapat memengaruhi pendapatan mereka

2.1. Upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin

Upah minimum yakni alat kebijakan ekonomi yang ditujukan melindungi pekerja dari eksploitasi serta memastikan mereka memperoleh pendapatan yang cukup guna pemenuhan kebutuhan dasar. Pada studi ini efek upah minimum atas jumlah penduduk miskin berdampak terhadap penurunan kemiskinan yang terjadi karena upah minimum yang ada pada Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Yogyakarta dengan periode 2013-2022 pastinya dengan nilai yang berbeda-beda karena kondisi di suatu wilayah berbeda juga.

Pada hubungan *Grand Theory* penawaran dan permintaan, pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin merupakan hasil dari interaksi kompleks antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kebijakan upah minimum yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga harus mempertimbangkan

keseimbangan pasar untuk menghindari dampak negatif seperti pengangguran. Pada penelitian Lavenia et al. (2023) dapat dikatakan upah minimum berpengaruh negatif dan dampak dari kenaikan upah minimum dinilai sangat signifikan karena dapat menaikkan pendapatan setiap masyarakatnya sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup.

2.2. PDRB terhadap jumlah penduduk miskin

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah parameter ekonomi yang menggambarkan total nilai barang dan juga jasa yang dihasilkan suatu wilayah di periode tertentu. PDRB yang tinggi biasanya mencerminkan aktivitas ekonomi yang sehat dan berpotensi mengurangi kemiskinan lewat penambahan kesempatan kerja serta pendapatan Mankiw (2014).

Dari penelitian Sinaga (2020) dapat disimpulkan bahwa PDRB per kapita, ketimpangan distribusi pendapatan dan IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap jumlah penduduk miskin

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merujuk pada persentase angkatan kerja yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan. Tingkatan pengangguran yang tinggi mengindikasikan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan sering kali berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tingkat pengangguran mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan ekonomi, karena pengangguran merupakan indikator kesejahteraan yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi (handayani, 2022). Pada penelitian Rohmah & Prakoso (2022) tingkat pengangguran terbuka yang dapat disimpulkan berpengaruh terhadap variasi naik turunnya tingkat kemiskinan.

2.4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap jumlah penduduk miskin

Trisnawati & Haryatiningsih (2022) mengungkapkan persoalan yang dijumpai Indonesia kini yakni seperti kurangnya prospek lapangan kerja. Hal tersebut menjadi permasalahan rumit yang melibatkan unsur-unsur negara kesejahteraan. Rata-rata lama sekolah ialah salah satu parameter tingkat pendidikan masyarakat disebuah wilayah. Pendidikan yang baik dan memadai dinilai menjadi satu dari banyak cara guna mengurangi kemiskinan, karena bisa meningkatkan keterampilan serta produktivitas individu. Dengan demikian, bisa berpeluang untuk memperoleh pekerjaan lebih baik dengan penghasilan relative tinggi.

Pada penelitian Faizin (2021) Secara bersamaan, baik upah minimum, kemiskinan dan pengangguran, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Namun, secara parsial, upah minimum memiliki pengaruh positif (searah) dan signifikan, kemiskinan memiliki pengaruh negatif (berlawanan arah) namun tidak signifikan, dan pengangguran memiliki pengaruh negatif (berlawanan) dan negatif (berlawanan) dan signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi masalah ekonomi dan sosial di masing-masing daerah.

2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap jumlah penduduk miskin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan keberdayaan ekonomi dan kesempatan kerja yang tersedia di suatu wilayah. Listorini (2022) menekankan bahwasannya selain tingkat pendidikan, keterampilan kerja juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan kerja. Anshari et al. (2018) menyatakan jika peningkatan TPAK didorong oleh terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas dibarengi upah yang sesuai, maka akan menurunkan kemiskinan tetapi jika peningkatan TPAK didorong oleh pertumbuhan sektor informal dengan upah yang rendah dan tidak adanya jaminan sosial maka akan memperparah kemiskinan.

Menurut Aziz & Husenudin (2024) permasalahan kemiskinan menjadi fokus serius yang harus ditangani oleh pemerintah daerah banyak yang harus dipertimbangkan pada kebijakan pemerintah agar kemiskinan yang berlanjut tidak semakin parah maka harus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan gampang untuk di akses, mendorong pertumbuhan sektor unggulan dan memperkuat jaringan pengaman sosial dari hubungannya mungkin tidak selalu linear karena untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan perlu adanya analisis yang dilakukan mendalam tergantung pada kondisi ekonomi sosial setiap daerah yang pastinya berbeda-beda.

Pada penelitian Zakiyyah et al. (2023) variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Perlu adanya pemerataan pemerataan hasil-hasil ekonomi kepada seluruh golongan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam upaya meningkatkan perekonomian di setiap daerah, serta untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, maka sektor pangan dan pangan dan pertanian harus ditingkatkan seoptimal mungkin.

2. Metode

Data dalam jurnal ini diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data sekunder dalam bentuk panel time series. Variabel dependen adalah jumlah penduduk miskin, sementara variabel independen meliputi Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta selama tahun 2013-2022. Penggunaan data panel bertujuan untuk menggambarkan variasi dan perubahan dalam rentang waktu tersebut. Analisis dilakukan menggunakan STATA-14 untuk mengidentifikasi pola, tren, dan signifikansi antar variabel. Pendekatan analisis deskriptif kuantitatif juga digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, sehingga diharapkan dapat memperkuat hubungan dengan permasalahan utama penelitian.

Tabel 2. 1 Definisi Operasional

VARIABEL	SIMBOL	SUMBER	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN
Kemiskinan	Y	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persentase Jumlah Penduduk miskin	Rupiah
Upah Minimum	X1	Badan Pusat Statistik (BPS)	Jumlah upah minimum kabupaten kota dengan standar kebijakan pemerintah suatu daerah	Juta Rupiah
PDRB	X2	Badan Pusat Statistik (BPS)	Total nilai yang diperoleh dari seluruh aktivitas bisnis diwilayah tertentu.	Juta Rupiah
TPT	X3	Badan Pusat Statistik (BPS)	Rasio jumlah pengangguran dibandingkan jumlah Angkatan kerja.	%
RLS	X4	Badan Pusat Statistik (BPS)	Rata-rata jumlah tahun belajar dalam pendidikan formal.	Tahun
TPAK	X5	Badan Pusat Statistik (BPS)	Proporsi partisipasi Angkatan kerja berusia 15 tahun keatas.	%

Pada kajian ini, alat analisa regresi data panel menggunakan *software* stata 14, melakukan gabungan dari data *time series* serta *cross section*, memberikan informasi relative banyak data yang memiliki sejumlah variabilitas dengan baik sedikitnya kolinearitas antarvariabel, relatif banyak derajat kebebasan (*degree of freedom*) serta tingkat efektivitas yang lebih tinggi (Gujarati, 2003). Model dari regresi data panel berupa:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 UMP_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 RLS_{it} + \beta_5 TPAK_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Jumlah Penduduk Miskin

UMP = Upah Minimum Provinsi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

TPAK = Tingkat Pengangguran Terbuka

β_{1234} = Nilai Koefisien Variabel 1,2,3, dan 4

α = Konstanta

i = 6 Provinsi dengan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa

t = kurun waktu (2013-2022)

e = Error Term

Di estimasi data panel, ada tiga pendekatan yang bisa dipakai dalam pengujian data, yakni CEM, FEM, serta REM. dalam data panel, uji asumsi klasik bersifat opsional. Beberapa peneliti mengabaikan uji asumsi klasik. Menurut Gujarati (2003) data panel memiliki kompleksitas mengenai perilaku yang ada dalam model. Oleh karena itu, data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik. pengujian asumsi klasik. Dengan demikian, keunggulan regresi data panel berimplikasi pada tidak diperlukannya uji asumsi klasik (A'yun & Khasanah, 2022)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Regresi Data Panel

Pada hasil model CEM, ada empat dari lima variabel independen yang signifikan dan berdampak atas variabel dependen, yakni Upah Minimum, PDRB, TPT, RLS, TPAK pada tingkat signifikan 5% (0.005). Upah Minimum memiliki nilai probabilitas sebesar 0.001, variabel PDRB memiliki nilai probabilitas 0.000, variabel TPT memiliki nilai probabilitas 0.029, begitu pula variabel RLS memiliki nilai probabilitas 0.000. Berdasarkan nilai koefisien dari masing-masing variabel, keempat variabel tersebut memiliki nilai koefisien yang positif. Artinya, ketika nilai tingkat kemiskinan memiliki kenaikan, maka variabel Upah Minimum, PDRB, TPT, RLS akan mengalami kenaikan.

Tabel 3. 1 Estimasi Regresi Data Panel

Variabel	CEM	FEM	REM
Upah Minimum (X1)	-0.2798816 (0.001) ***	0.0047183 (0.978)	-0.2798816 (0.000) ***
PDRB (X2)	-0.1345546 (0.000) ***	0.1556633 (0.706)	0.1345546 (0.000) ***
TPT (X3)	-0.2005252 (0.029) **	0.1460441 (0.098)	-0.2005252 (0.025) **
RLS (X4)	-1.193286 (0.000) ***	-1.503905 (0.122)	-1.193286 (0.000) ***
TPAK (X5)	0.9755545 (0.139)	-0.4784766 (0.293)	0.9755545 (0.134)
Cons	2.385803 (0.402)	4.044983 (0.492)	2.385803 (0.398)

Hasil dari model FEM diketahui bahwasannya dari sejumlah variabel independen, tidak ada yang signifikan dan berpengaruh pada dependen diseluruh tingkat signifikansi. Selanjutnya, pada hasil uji model REM, terdapat empat dari lima variabel bebas yang signifikan serta berdampak pada variabel terikat pada tingkat signifikan 5% (0.005), yaitu variabel Upah Minimum, PDRB, TPT, dan RLS. Nilai probabilitas dari Upah Minimum adalah 0.000, variabel PDRB yaitu 0.000, variabel TPT nilai probabilitas nya 0.025, begitu juga dengan variabel RLS yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000. Berdasarkan hasil uji model REM, keempat variabel independen tersebut memiliki nilai koefisien yang positif, dimana ketika nilai kemiskinan meningkat maka variabel upah minimum, PDRB, TPT, dan RLS akan meningkat juga.

3.2 Uji Chow

Uji Chow pada regresi panel dilaksanakan guna melihat apakah permodelan terbaik untuk melakukan estimasi data panel adalah CEM ataupun FEM. Uji chow mempunyai asumsi dengan ketentuan jika probabilitas dibawah 5% berarti model yang baik ialah CEM dan ketika probabilitas diatas 5% maka FEM dipilih sebagai model terbaik.

Tabel 3. 2 Uji Chow

<i>Chi2(21)</i>	15.55
<i>Prob>chi2</i>	0.0000

3.3 Uji Hausman

Uji hausman pada regresi panel ditujukan untuk mengetahui model terpilih pada studi data panel diantara FEM serta REM dengan syarat jika probabilitas dibawah 5% permodelan yang bisa dipakai yakni FEM dan ketika probabilitas diatas 5% maka REM dipilih sebagai model terbaik.

Tabel 3. 3 Uji Hausman

<i>Chi2(21)</i>	297.08
<i>Prob>chi2</i>	0.0000

3.4 Uji Lagrange Multiplier

Ketika model penelitian memiliki kecenderungan bias, maka akan dipilih model yang dianggap sebagai pilihan untuk penelitian dengan hasil yang lebih optimal. Uji Lagrange Multiplier ditujukan guna mode pengujian terbaik antara CEM dan juga REM, Dimana jika probabilitas dibawah 5%, yang terpilih berarti REM dan ketika probabilitas diatas 5% maka CEM dipilih sebagai model terbaik.

Tabel 3. 4 Uji LM

<i>Chi2(01)</i>	0.00
<i>Prob>chi2</i>	1.0000

3.5 Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji Hetero yang telah dilakukan, terlihat bahwa nilai probabilitas Chi-Square $0.0000 < 0.05$. ini mengindiasikan tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas.

Tabel 3. 5 Uji Hetero

<i>Chi2(06)</i>	195.34
<i>Prob>chi2</i>	0.0000

3.6 Uji Autokolerasi

Tabel 4.7 dari hasil uji adalah $0.0162 < 0.05$. hal ini mengindikasikan adanya autokolerasi pada data penelitian ini.

Tabel 3. 6 Asumsi Klasik (Uji Autokorelasi)

<i>F (1,5)</i>	12.691
<i>Prob>chi2</i>	0.0162

3.7 Uji Multikolinearitas

Dari Tabel 3.7 dari hasilnya disimpulkan bahwa uji multikolinearitas memperoleh nilai koefisien korelasi antar variabel yang bernilai kurang dari 0.90. artinya, menunjukan tidak terdapat masalah Multikolinearitas. sementara saat nilainya diatas 9% berarti ada masalah.

Tabel 3. 7 Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas)

	Kemiskinan	Umr	Pdrb	Tpt	Rls	Tpak
Kemiskinan	1.0000					
Upah Minimum	-0.7548	1.0000				
PDRB	0.6214	-0.1921	1.0000			
TPT	-0.6739	0.3571	-0.6915	1.0000		
RLS	-0.6951	0.7996	-0.0638	0.2163	1.0000	
TPAK	0.6648	-0.3300	0.7336	-0.7608	-0.2046	1.0000

3.8 Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji Normalitas secara umum pada variabel PDRB, TPT, RLS < 0.05 tidak terdapat masalah normalitas. Sedangkan, pada variabel upah minimum dan TPAK memiliki probabilitas > 0.05 maka terdapat masalah normalitas pada data penelitian. Nilai probabilitas yang melebihi 5% menandakan penggunaan metode SUR permodelan paling tepat untuk kajian ini.

Tabel 3. 8 Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Variabel	Obs.	z	<i>Prob>z</i>
Upah Minimum	66	1.313	0.09458
PDRB	66	4.314	0.00001
TPT	66	2.405	0.00809
RLS	66	2.298	0.01079
TPAK	66	1.104	0.13476
Jumlah Penduduk Miskin	66	3.867	0.00005

3.9 Seemingly Unrelated Regression

Dalam penelitian ini menggunakan uji panel statis yang menghasilkan bahwa temuan inkonsisten karena terdapat indikasi permasalahan asumsi klasik, maka SUR menjadi metode yang tepat untuk dipakai pada penelitian ini. Tujuan penggunaan metode ini untuk memastikan variabel yang digunakan tidak mengalami bias, sehingga dapat menjadi akurat dan jelas.

Meskipun REM dianggap sebagai model terbaik pada penelitian ini metode *Seemingly Unrelated Regression (SUR)* dapat dijadikan sebagai pilihan tepat untuk mendeteksi korelasi antar *error terms* sehingga, penggunaan SUR pada penelitian memberikan estimasi yang lebih realistis serta efisien terutama ketika terdapat masalah penelitian yang tidak dapat ditangani oleh model panel standar.

Maka metode SUR juga mampu melakukan penanganan lebih baik terhadap masalah autokorelasi dengan pertimbangan korelasi antara *error terms*.

Tabel 3. 9 Uji SUR

Variabel	Coef.	Panel-corrected Std. Error	z	p> z
Upah Minimum	-0.2798816	0.1089192	-2.75	0.010
PDRB	1.345546	0.0244936	5.49	0.000
TPT	-0.2005252	0.102401	-1.96	0.050
RLS	-1.193286	0.1943184	-6.14	0.000
TPAK	0.9755545	0.7562705	1.29	0.197
Cons	2.385803	3.199472	0.75	0.456

Model *Seemingly Unrelated Regression* (SUR) menunjukkan hasil bahwa empat variabel bebas secara signifikan berdampak pada variabel terikat, serta variabel dependen kemiskinan lag pertama yang signifikan pada tingkat signifikan 5% (0,005). Keempat variabel independen tersebut adalah Upah Minimum, PDRB, TPT, dan RLS. Variabel PDRB dan RLS memiliki nilai probabilitas 0.000, variabel Upah Minimum 0.010 dan variabel TPT memiliki nilai probabilitas 0.050. Pada hasil estimasi regresi data panel dinamis dengan metode *Seemingly Unrelated Regression*, bisa diuraikan formulasi regresi data panel seperti dibawah ini:

$$Y = 2.385803 + -0.2798816 * \text{Upah Minimum} + 1.345546 * \text{PDRB} + -0.2005252 * \text{TPT} + -1.193286 * \text{RLS} - 0.9755545 * \text{TPAK}$$

Dari persamaan regresi yang sudah ditentukan pada data panel studi ini bisa dijabarkan sepertihalnya berikut:

- Nilai konstanta 2.385803 mengindikasikan bahwasannya variabel independen dalam regresi, yakni Upah Minimum, PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rata-rata Lama Sekolah, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki nilai konstan, maka tingkat pengungkapan Jumlah Penduduk Miskin sebagai variabel dependen di Indonesia sebesar 2.385803.
- Nilai koefisiensi variabel Upah Minimum 0.2798816 dengan nilai negatif, yang menyatakan jika Upah Minimum bertambah 1%, Jumlah Penduduk Miskin turut menurun 0.2798816%.
- Nilai koefisiensi variabel PDRB 1.345546 nilainya positif yang menyatakan jika kualitas regulasi naik 1%, jumlah penduduk miskin serta-merta bertambah 1.345546%.
- Nilai koefisiensi variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) -0.2005252 dengan nilai negatif, yang menyatakan saat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik 1% maka jumlah penduduk miskin turun 0.2005252%.
- Nilai Koefisiensi pada variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) -1.193286 dengan nilai negatif yang menyatakan ketika RLS naik 1%, akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 1.193286%.
- Nilai koefisiensi pada variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 0.9755545 dengan nilai positif yang menyatakan apabila TPAK meningkat 1%, serta-merta menambah jumlah penduduk miskin sekitar 0.9755545%.

3.10 Uji Apriori

Berdasarkan hasil Uji Apriori Ekonomi menunjukan empat dari lima variabel lolos Uji Apriori sedangkan yang tidak lolos Uji Apriori yaitu variabel TPAK yang artinya hasil penelitian sudah sesuai dengan teori.

Tabel 3. 10 Uji Apriori

Variabel	Hipotesis	Hasil	Keterangan
UMR	(-)	(-)	Lolos Uji Apriori

Variabel	Hipotesis	Hasil	Keterangan
PDRB	(+)	(+)	Lolos Uji Apriori
TPT	(-)	(-)	Lolos Uji Apriori
RLS	(-)	(-)	Lolos Uji Apriori
TPAK	(-)	(+)	Tidak Lolos Uji Apriori

Hasil pengujian signifikansi parameter individual menunjukkan bahwa:

a. Pengujian hipotesis Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Dari hasil menggunakan metode *Seemingly Unrelated Regression* (SUR) menunjukkan dari Upah Minimum dengan z-hitung -2,75 dengan koefisien sebesar -0.2798816 hasil menunjukkan bahwa peningkatan Upah Minimum berpengaruh positif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, sehingga terdapat penerimaan H_0 .

b. Pengujian hipotesis PDRB terhadap Kemiskinan

PDRB memiliki nilai z-hitung 5,49 dengan koefisien 1.345546 yang menunjukkan bahwa PDRB berdampak signifikan dalam meningkatkan jumlah penduduk miskin, sehingga H_0 ditolak. Sehingga, ketika PDRB mengalami peningkatan maka jumlah penduduk kemiskinan akan meningkat pula.

c. Pengujian hipotesis TPT terhadap Kemiskinan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki nilai z-hitung -1,96 dengan koefisien -0.2005252. Hasil tersebut menunjukkan TPT berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sehingga H_0 ditolak.

d. Pengujian hipotesis RLS terhadap Kemiskinan

RLS memiliki nilai z-hitung -6,14 dengan koefisien -1.193286. Hasil tersebut menunjukkan bahwa RLS berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sehingga H_0 diterima.

e. Pengujian hipotesis TPAK terhadap Kemiskinan

Variabel TPAK memiliki nilai z-hitung 1,29 dan nilai koefisien 0.9755545, dengan artian bahwa TPAK tidak memiliki efek signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.

4. Kesimpulan

Dari hasil analisa diketahui bahwasannya upah minimum memiliki efek signifikan pada jumlah penduduk miskin di provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Yogyakarta dengan koefisien -0.2798816. Artinya, ketika upah minimum naik 1%, jumlah penduduk miskin turun 0.2798816%. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa kenaikan upah minimum dapat mengurangi kemiskinan, sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Dakhilullah (2023). Peningkatan upah minimum meningkatkan pendapatan pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli dan membantu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan. Dari hasil tersebut provinsi Pulau Jawa banyak pengaruh dari beberapa faktor karena setiap daerah akan berbeda-beda faktornya.

Namun, hasil ini juga menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum bisa meningkatkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Provinsi dengan upah minimum yang lebih tinggi, seperti Jakarta dan Banten, cenderung mengalami penurunan kemiskinan yang lebih signifikan dibandingkan provinsi lainnya. Faktor-faktor seperti kesempatan kerja dan inflasi juga berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

4.1 Saran

1. Kebijakan upah minimum yang berkelanjutan pemerintah perlu terus menyesuaikan upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi dan produktivitas agar dapat terus meningkatkan daya beli pekerja tanpa menyebabkan ketimpangan ekonomi yang signifikan.
2. Penguatan sektor informal dan pekerja rentan selain meningkatkan upah minimum, pemerintah perlu memprioritaskan perhatiannya terutama di bidang informal serta pekerja rentan yang mungkin tidak merasakan manfaat dari kenaikan upah minimum. Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi dapat membantu mereka mendapatkan pendapatan yang lebih stabil.
3. Peningkatan pendidikan dan keterampilan pemerintah harus mendorong program pendidikan diikuti pelatihan kerja yang relevan dengan keperluan pasar untuk menambah persaingan tenaga kerja. Hal ini akan membantu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mengurangi ketergantungan pada sektor informal.
4. Pemerataan pembangunan ekonomi adalah upaya untuk memperkuat ekonomi di provinsi yang kurang berkembang, seperti Jawa Tengah dan Yogyakarta, melalui investasi infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, dan penciptaan peluang ekonomi baru, penting untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, peningkatan upah minimum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia.

Referensi

- Abdullah, A., & Hasbiullah. (2023). *PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM PROVINSI, BELANJA MODAL, DAN PENGANGGURAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI INDONESIA*.
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni. (2018). ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SELURUH PROVINSI DI INDONESIA. *EcoGen*, 1(3).
- A'yun, I. Q., & Khasanah, U. (2022). The Impact of Economic Growth and Trade Openness on Environmental Degradation: Evidence from A Panel of ASEAN Countries. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 23(1), 81–92. <https://doi.org/10.18196/jesp.v23i1.13881>
- Aziz, A., & Husenudin, A. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1771>
- Bank Indonesia. (2021). *LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BANTEN PERIODE MEI 2021*.
- Dakhilullah, M. F. (2023). Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. In *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* (Vol. 1, Issue 1).
- Faizin, Moh. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 214–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic econometrics*. McGraw Hill.
- handayani, siti firda. (2022). PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN PROVINSI JAWA BARAT 2013-2020. *Ad Ridwan*, 2(1).

- Husada, A. P., & Yuhan, R. J. (2022). Direct dan Indirect Effect: Determinan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 98–116. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.06>
- Kuncoro, M. (2013). *Ekonomika Pembangunan*.
- Lavenia, L., Mandai, S., & Lutfi, M. Y. (2023). PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), UPAH MINIMUM, PENGANGGURAN, JUMLAH PENDUDUK DAN ANGKA MELEK HURUF TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 - 2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 319–328. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15412>
- Listorini, D. (2022). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KETERAMPILAN KERJA, DAN SIKAP KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN DI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI JAKARTA. *ALIANSI*, 17(1).
- Listri, D., & Khoirudin, R. (2019). penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur di Jawa Tnegah 2011-2015. *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>
- Prayoga, R. D., Wardani, D. T. K., & Hartarto, R. B. (2022). The Effect of City/District Minimum Wages on Poverty Levels: A Case Study of the Special Region of Yogyakarta in 2010-2019. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(2), 93–97. <https://doi.org/10.18196/jerss.v6i2.14401>
- Rohmah, I. S., & Prakoso, J. A. (2022). PENGARUH IPM, RLS, TPT, DAN PENGELUARAN PERKAPITA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT. *TRANSEKONOMIKA*, 2(6). <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Sari, Y. A. (2021). PENGARUH UPAH MINIMUM TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Equilibrium*, 10(2), 121–130.
- Sugiyanto, F., & Suripto. (2020). Poverty viewed from the perspective of domestic production in Yogyakarta: the Solow growth model approach Poverty viewed from the perspective of domestic production in Yogyakarta 175. *Int. J. Business and Globalisation*, 24(2), 174–184.
- Trisnawati, R., & Haryatiningsih, R. (2022). Pengaruh PDRB, Jumlah Sektor Industri & Upah Minimum terhadap Kesempatan Kerja di 10 Kabupaten/Kota Jawa Barat Periode 2017-2021. *Bandung Conference Series: Economics Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i1.ID.11174>
- Ulhafiah, N., & Arianti, F. (2023). ANALISIS PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI, IPM, DAN PDRB TERHADAP TINGKAT KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011-2021. *BISECER*, VI(2).
- Istanti, & Suripto. (2009). *Characteristics of Demography, economic factors and poverty in Gunungkidul Regency*.
- Zakiyyah, N. A. A., Lubis, F. R. A., & Wahyuni, I. (2023). Determinants of Poverty In Indonesia. *EKO-REGIONAL: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 18(2). <https://doi.org/10.32424/1.erjpe.2023.18.2.3182>